ISSN 0216-1338

Jurnal LEGISLASI INDONESIA

Indonesian Journal of Legislation

Vol. 16 No. 3 - September 2019

Problematika Dualitas Pengaturan Unsur Iklan Kampanye Pemilihan Umum (Keberlakuan Frasa "Visi, Misi, Dan Program" Dalam PKPU 23 Tahun 2018, Versus "Citra Diri" Dalam Perbawaslu 28 Tahun 2018)

Mendudukkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau

Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara

Rekonstruksi Pergeseran Paradigma Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Pra Pemilihan Kepala Daerah

Politik Hukum Hierarki TAP MPR Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Kendala Hukum Penindakan Terhadap Pesawat Udara Sipil Asing Tidak Berizin yang Memasuki Wilayah Udara Indonesia

Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum

Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)

Prinsip Prinsip Cyber Law pada Media Over The Top E-Commerce Berdasarkan Transformasi Digital di Indonesia

JLI	Vol. 16	Nomor 3	Jakarta Juni 2018	Hlm 278 - 398	ISSN 0216-1338

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

ISSN 0216-1338

Jurnal LEGISLASI INDONESIA

Vol. 16 No. 3 - September 2019 Hlm 278 - 398

Jurnal Legislasi Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel hasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam bidang perundang-undangan dan hukum. Dikelola dan diterbitkan oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diterbitkan (4) empat kali dalam setahun yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jurnal Legislasi Indonesia diharapkan menjadi salah satu media untuk mempublikasikan pemikiran dari para praktisi perundang-undangan dan hukum, para perancang peraturan perundang-undangan di seluruh instansi kementerian atau lembaga non kementerian maupun yang menaruh perhatian terhadap isu-isu legislasi di Indonesia.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI:

Pembina	:	Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H. M.Hum
Penanggungjawab	:	Unan Pribadi, S.H., M.H
Editor	:	1. Rizki Arfah. S.H 2. Ratih Sri Martani, S.E., S.H., M.Si
Bagian Editing	:	1. Hananta Sugama, S.T. 2. Akhmad Dian Hartantie, S.Sos
Penyunting Tata Bahasa	:	1. Devi Novita, S.Kom. 2. Melita Berlina Meliala, S.H.
Penyunting Tata Letak dan IT	: :	1. I Gede Dodi Bariman, S.H.,M.M 2. Muchtar Sani, S.Kom.
Cetak Draft	:	1. Ursula Nova Salmi, A.Md. 2. Sukarti, S.H.,M.H.

Mitra Bestari :

1. Prof. Dr. Galang Asmara, S.H., M.Hum..
   Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum
   Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar
3. Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H
   Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali

Penerbit:
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 52921242, Fax. (021) 52921242
e-mail: legislasi@yahoo.com
e-jurnal: http//e-jurnal.peraturan.go.id

DARI REDAKSI

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Jurnal Legislasi Indonesia (JLI) Volume 16 Nomor 3 Tahun 2019 telah diterbitkan dan memuat 10 (sepuluh) artikel. Artikel yang dimuat selalu memperhatikan kaedah-kaedah jurnal ilmiah dan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. JLI Volume 16 Nomor 3 Tahun 2019 selain diterbitkan dengan media cetak juga dipublikasikan secara elektronik melalui laman *www.e-jurnal.peraturan.go.id*.

JLI Volume 16 Nomor 2 Tahun 2019 membahas mengenai Problematika Dualitas Pengaturan Unsur Iklan Kampanye Pemilihan Umum (Keberlakuan Frasa "Visi, Misi, Dan Program" dalam PKPU 23 Tahun 2018, Versus "Citra Diri" dalam Perbawaslu 28 Tahun 2018), Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Doktrin Perundang-Undangan, Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau, Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Merekonstruksi Hukum Acara, Rekonstruksi Pergeseran Paradigma Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Pra Pemilihan Kepala Daerah, Politik Hukum Hierarki TAP MPR melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Kendala Hukum Penindakan Terhadap Pesawat Udara Sipil Asing Tidak Berizin Yang Memasuki Wilayah Udara Indonesia, Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum, Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional), dan Prinsip Prinsip Cyber Law Pada Media Over the Top E-Commerce Berdasarkan Transformasi Digital di Indonesia.

Redaksi JLI mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Galang Asmara, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum., dan Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H. sebagai Mitra Bestari yang telah memberikan telaahan, penilaian dan saran terhadap artikel Jurnal Legislasi Indonesia.

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan

Jakarta, September 2019

Salam Redaksi

DAFTAR ISI

Dari Redaksi i

Daftar Isi iii

Artikel:

Problematika Dualitas Pengaturan Unsur Iklan Kampanye Pemilihan Umum (Keberlakuan Frasa "Visi, Misi, Dan Program" dalam PKPU 23 Tahun 2018, Versus "Citra Diri" dalam Perbawaslu 28 Tahun 2018)
Gunawan A. Tauda 278 - 288

Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Doktrin Perundang-Undangan
Sarip, Diana Fitriana, dan Elya Kusuma Dewi 289 - 298

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau
Penny Naluria Utami 299 - 312

Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Merekonstruksi Hukum Acara
Mirja Fauzul Hamdi 313 - 324

Rekonstruksi Pergeseran Paradigma Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Pra Pemilihan Kepala Daerah
Kadek Agus Sudiarawan dan Bagus Hermanto 325 - 343

Politik Hukum Hierarki TAP MPR melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
Ahmad Gelora Mahardika 344 - 352

Kendala Hukum Penindakan Terhadap Pesawat Udara Sipil Asing Tidak Berizin Yang Memasuki Wilayah Udara Indonesia
Danang Risdiarto 353 - 368

Pembaharuan Kebijakan Hukum *Asset Recovery*: Antara *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*
Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus 369 - 378

Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)
Halimatul Maryani dan Adawiyah Nasution 379 - 391

Prinsip Prinsip *Cyber Law* Pada Media *Over the Top E-Commerce* Berdasarkan Transformasi Digital di Indonesia
Tasya Safiranita, Ahmad M Ramli, Danrivanto Budhijanto, Rika Ratna Permata, Huala Adolf, Eddy Damian, Miranda Risang Ayu Palar 392 - 398